



Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia

DPN PERMAHI

WEBINAR HUKUM NASIONAL

Tema:
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN RUNTUHNYA KEAGUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Opening Speech:

FIRMAN JAYA DAELI

Ketua Dewan Pembina
PUSPOLKAM Indonesia;
Mantan Anggota
Komisi Politik & Hukum
DPR-RI



Keynote Speaker

Prof. Dr. MAHFUD MD.

Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum Dan Keamanan
(MENKO-POLHUKAM-RI)



PEMBICARA:



Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum..

Mantan Komisioner Komisi Yudisial
KY-RI



Prof. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D.

Praktisi Hukum;
Mantan Wakil MENKUMHAM-RI



Dr. ABDUL AZIZ HAKIM, S.H., M.H.

Pengamat Hukum Dan
Pakar Hukum Tata Negara



ZOOM ROOM

Kamis 24 November 2022

Jam : 08.00 WIB-Selesai

Moderator:

DESHANDRA YUSUF S. A.

Ketua Bidang
Pendidikan & Pelatihan Hukum
DPN PERMAHI



Sambutan:

SAIFUL SALIM

Ketua Umum
DPN PERMAHI



TERBUKA UNTUK UMUM

0812-2846-6009 :
Panitia

Pendaftaran & Join Group
<http://linktr.ee/dpnpermahi>

INTEGRITY IN TE

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

GRI TY

Webinar Hukum Nasional

**RUNTUHNYA (LAGI) INSTITUSI MAHKAMAH AGUNG?
INTEGRITAS HAKIM DALAM SOROTAN DAN HARAPAN**

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner at INTEGRITY Law Firm

Melbourne, 24 November 2022



[dpnpermahi.official](https://www.instagram.com/dpnpermahi.official)

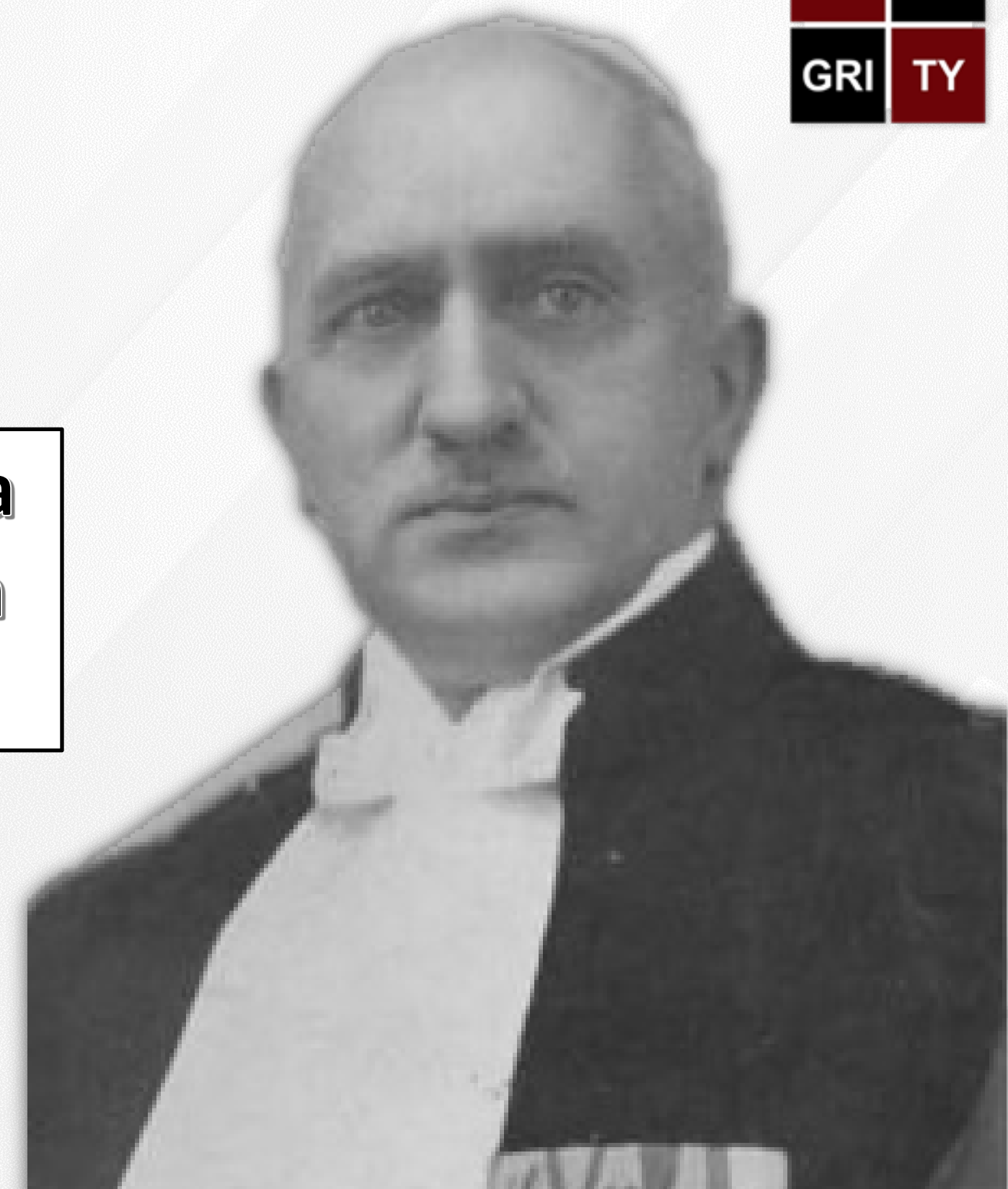


dpnpermahi.office@gmail.com



[dpn permahi channel](https://www.youtube.com/channel/UC...)

"Berikan kepadaku Jaksa, Hakim, dan Pengacara yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun aku dapat membuat putusan yang baik."



Bernardus Maria Taverne
Hakim, Profesor Hukum Pidana Universitas Amsterdam

Studi tentang Runtuhnya Sebuah Institusi Pengadilan

Dua persoalan pokok yang kerap kali muncul mengenai Pengadilan

Pertama,
Independensi

- Sarat akan Intervensi

Kedua, **Korupsi,**
Kolusi dan
Nepotisme

- Praktik suap, lobi-lobi politik, dan putusan yang jauh dari rasa keadilan

***Tidak hanya di Pengadilan, kondisi demikian juga kerap muncul pada aparat penyelenggara negara lainnya.**

Independensi Hakim Seringkali diintervensi oleh Lembaga lain demi Kepentingan Politik



Pencopotan Hakim Aswanto, ICW Anggap DPR Mau Tundukkan MK

CNN Indonesia
Kamis, 13 Okt 2022 23:30 WIB
Bagikan :



suara.com
NEWS BISNIS BOLA SPORT LIFESTYLE ENTERTAINMENT OTOMOTIF TEKNO HEALTH
yoursay.id Cek Fakta Infografis JAKARTA BOGOR BEKACI JABAR JOGJA JATENG MALANG
Pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Etik dan Intervensi MK, Ketua Komisi III Dilaporkan ke MKD DPR
Erick Tanjung | Novian Ardiansyah Selasa, 10 Oktober 2022 | 10:12 WIB



Kompas.com / News / Nasional
Hakim Aswanto Mendadak Dicapot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik
Kompas.com - 01/10/2022, 12:10 WIB

BAGIKAN: [Facebook] [Twitter] [WhatsApp] [Telegram] Komentari 44

Lihat Foto

Hakim Aswanto demi Kepentingan
Kompas.com - 01/10/2022, 12:10 WIB
BAGIKAN: [Facebook] [Twitter] [WhatsApp] [Telegram]



“Pencopotan salah satu Hakim MK, Aswanto, oleh DPR adalah salah satu fakta bahwa lembaga Peradilan adalah lembaga yang paling rentan untuk diintervensi”

Persoalan-Persoalan Besar Lain tentang Pengadilan



Beberapa Fakta Kasus Korupsi Oleh Hakim



Siaran Pers

Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan

Friday, 23 September 2022 - 18:58



Sumber Foto: Kompas

Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, semakin mencoreng dunia peradilan. Dari sepuluh orang tersebut, satu di antaranya merupakan Hakim



Kompas.com > News > Nasional

KPK OTT Hakim Agung

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Korupsi, Pakar Hukum: Ironis dan Menvedihkan

Kompas.com, 26 September 2022, 10:49 WIB



Komentar



Lihat Foto

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL

Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/9/2022). Sudrajad ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya, termasuk pegawai pada Kepaniteraan MA, pengacara, dan pihak swasta terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.



Home > Nasional > Hukum Kriminal

KPK Dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati Lewat Hakim Agung MA Lain

CNN Indonesia

Sabtu, 15 Okt 2022 02:51 WIB



Iklan ditutup oleh Google

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perkara yang menjerat



Buntut OTT KPK Sudrajad Dimyati, KPK Tetapkan Tersangka Baru Hakim Agung dalam Kasus Suap MA!

Vod | 11 November 2022 | 12:39 WIB



JAKARTA, KOMPAS.TV - Jumlah tersangka dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung bertambah.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap Hakim Agung, Sudrajad Dimyati.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut salah satu tersangka baru tersebut adalah

Beberapa Fakta Kasus Korupsi Oleh Hakim

detiknews

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur Int

MA Pecat 4 Pegawai Terkait Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati

M Hanafi Aryan - detikNews

Jumat, 28 Okt 2022 19:51 WIB

BAGIKAN

Komentar



Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan (Hanafi/detikcom)

Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan menyebut telah memecat empat pegawai MA terkait kasus suap penanganan perkara yang menjerat Hakim

detiknews

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur Int


Ini Kasus Korupsi yang Menjerat Hakim Agung Gazalba Saleh

M Hanafi Aryan - detikNews

Senin, 14 Nov 2022 14:18 WIB

BAGIKAN

Komentar



Hakim Agung Gazalba Saleh (Dok. KY)

Jakarta - Hakim Agung Gazalba Saleh ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi usai KPK melakukan pengembangan kasus yang menjerat Hakim Sudrajad Dimiyati.

KOMPAS.com

JERNIH MELIHAT DUNIA

Kompas.com > News > Nasional

Dua Hakim Agung Tersangka Korupsi, Pakar Hukum: KY Kebanyakan Makan Gaji Buta

Kompas.com, 16 November 2022, 07:29 WIB

Komentar

Lihat Foto



Tatang Guritno/ Kompas.com

Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2021).

ANTARA SULTRA

TERKINI TERPOPULER TOP NEWS NUSANTARA

Hakim Agung Gazalba Saleh tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA

Minggu, 13 November 2022 17:38 WIB

Komentar



Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Indonesia Corruption Perceptions Index 2021

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

2021

Indone

Score	Country	Rank
38	Indonesia	96

ASIA PACIFIC

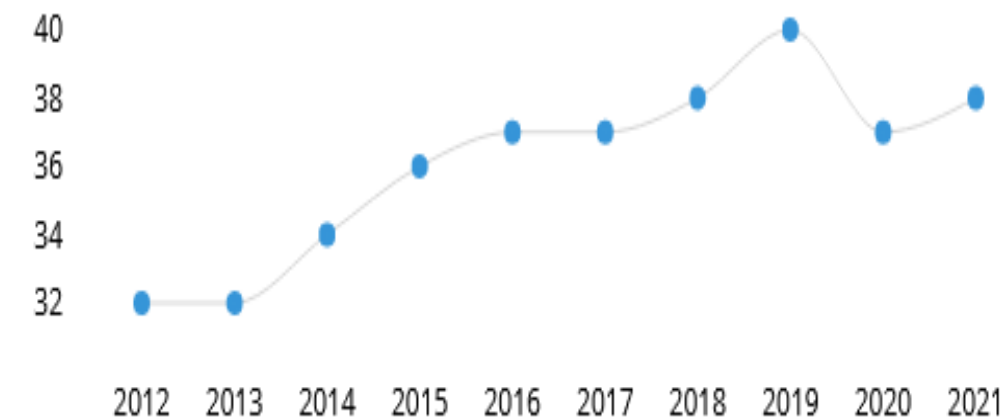
INDONESIA

Score
38/100 [What does the CPI score mean?](#)

Rank
96/180

Score change
 +1 since 2020

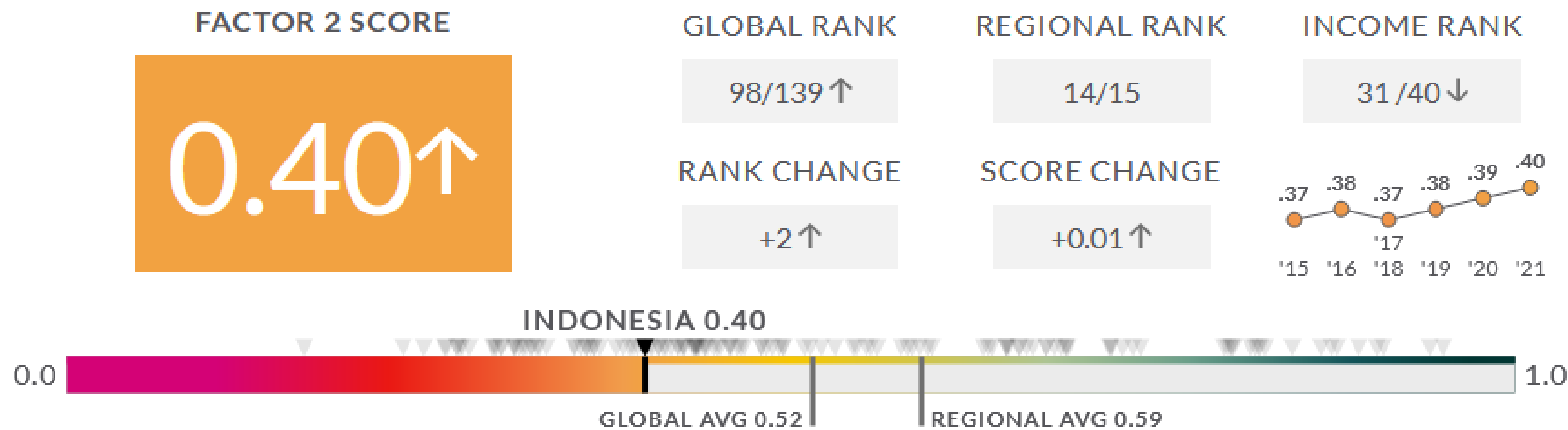
Score changes 2012 - 2021



- Nilai **CPI 38/100**.
- Peringkat **96/180** Negara.
- Peningkatan korupsi yang selalu meningkat signifikan.

2 | Absence of Corruption for Indonesia, 2021

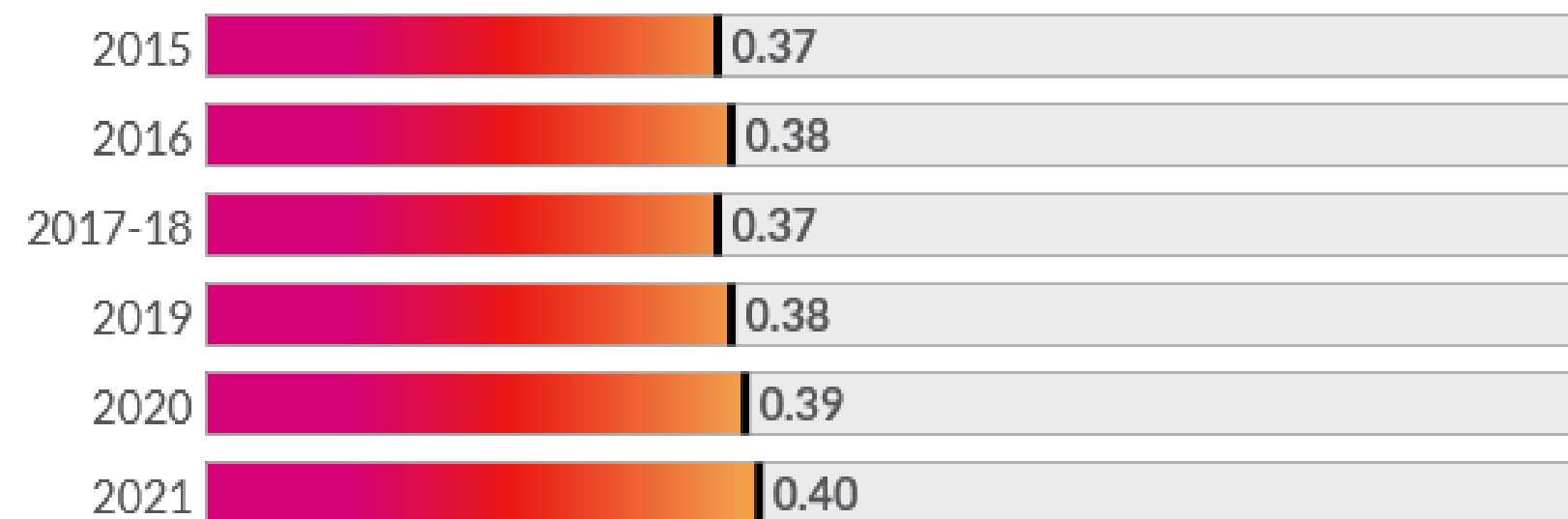
Arrows signify year-to-year change



Overview Absence of Corruption for Indonesia 2021

FACTOR 2 | Absence of Corruption for Indonesia, 2015 - 2021

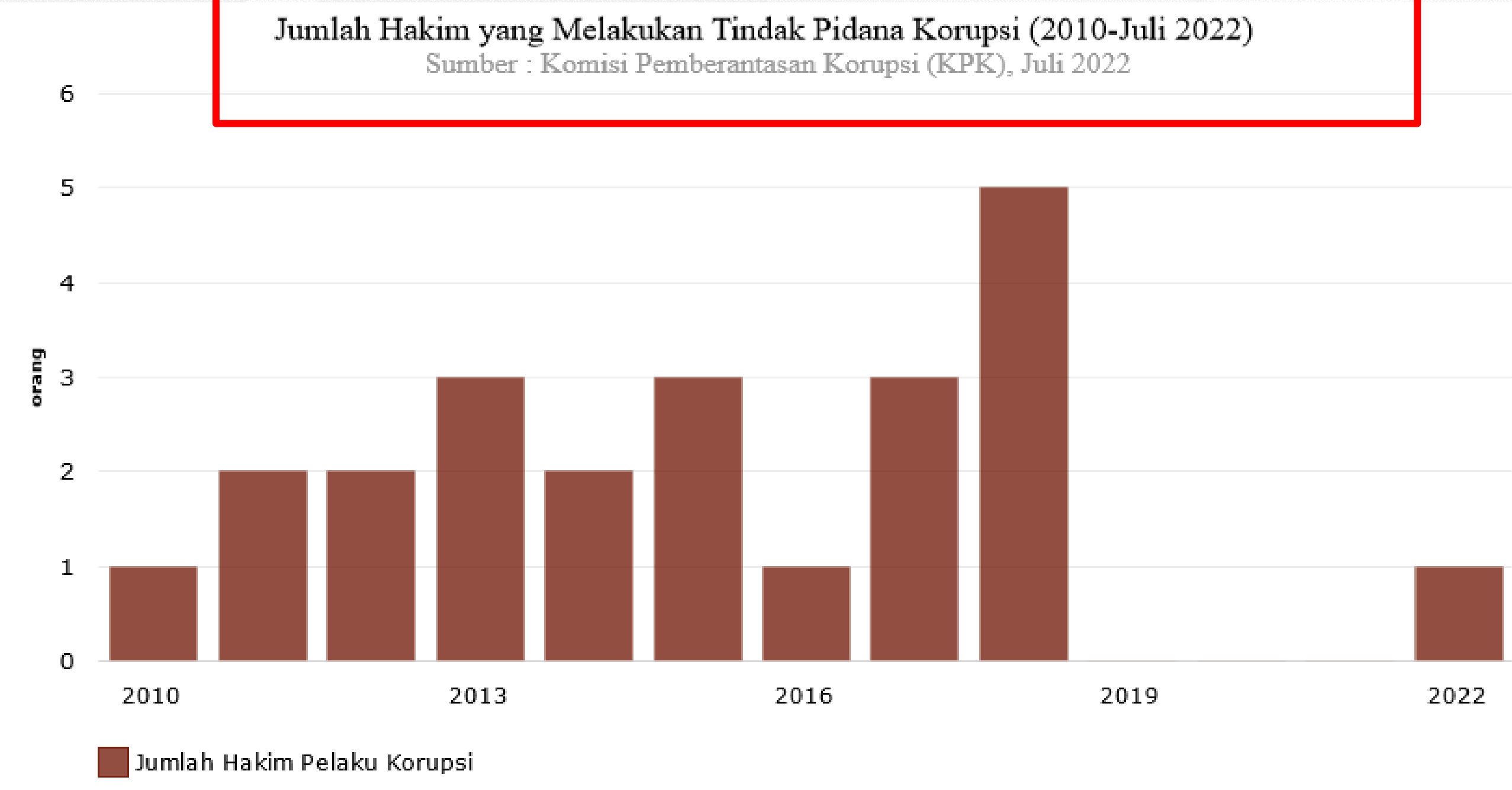
Indonesia scores for Absence of Corruption from 2015 to 2021. (Use the left menu to explore other scores.)



- Peningkatan 0.01 dalam 7 tahun
- Index berada jauh dibawah rata-rata regional
- Korupsi masih menjadi faktor yang memprihatinkan

Jumlah Hakim Tersangka Kasus Korupsi

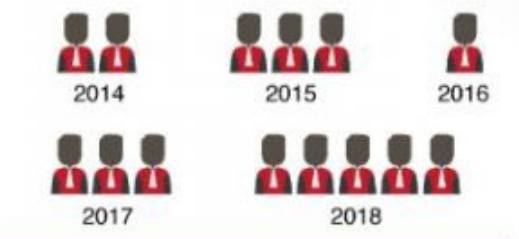
Jumlah Hakim yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (2010-Juli 2022)
Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juli 2022



Sumber: KPK, Juli 2022 dimuat dalam: <https://www.kpk.go.id/id/splash>

Hakim dan Panitera yang Terjerat Kasus Korupsi

Kasus Tindak Pidana Korupsi Hakim dalam Beberapa Tahun (Data KPK)



Hakim

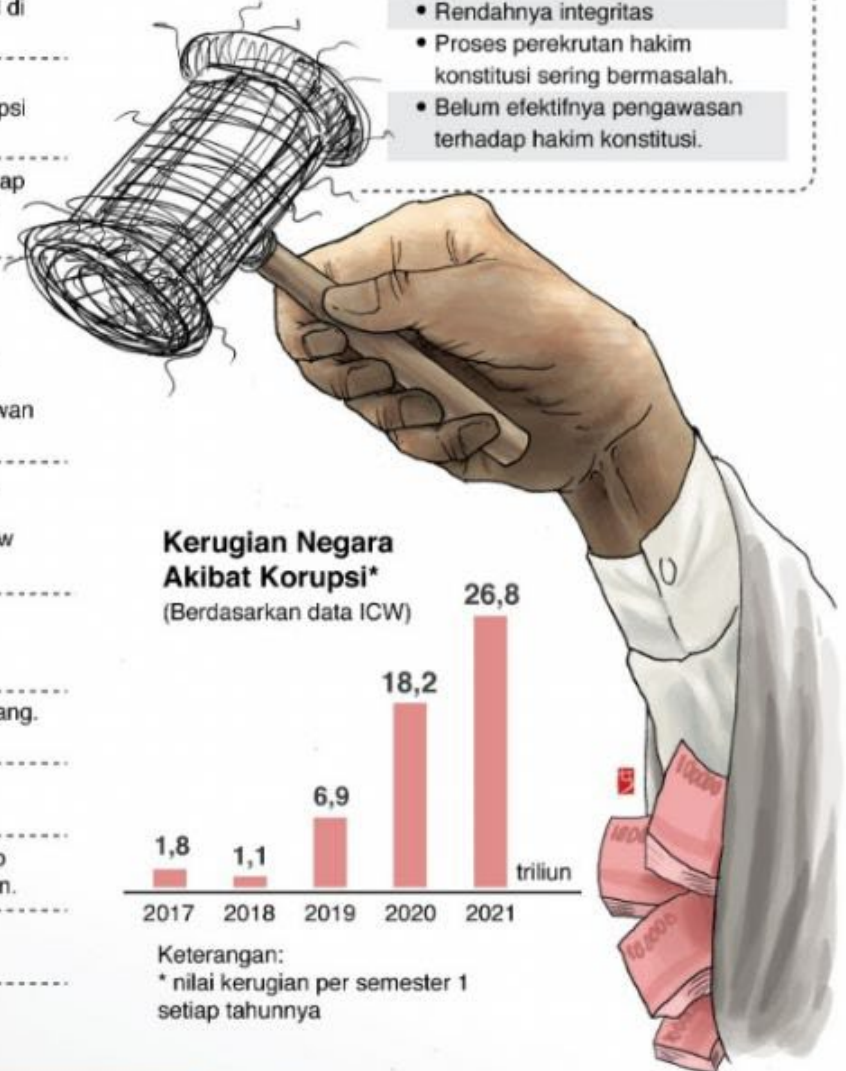
- **Kartini Marpaung**, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Semarang. Kartini diduga menerima suap **Rp150 juta** terkait kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni.
- **Heru Kisbandono**, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Pontianak. erjerat kasus suap hakim pengadilan Tipikor Semarang.
- **Pragsono**, hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Terbukti melakukan praktik jual beli putusan saat mengadili perkara korupsi Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni.
- **Setyabudi Tejocahyono**, Wakil Ketua PN Bandung. Diduga menerima suap **Rp150 juta** terkait kasus suap bantuan sosial (bansos) di Bandung.
- **Ramlan Comel**, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Bandung. Diduga terlibat suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
- **Pasti Serefina Sinaga**, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Terlibat suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
- **Amir Fauzi**, hakim PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan pada 2015.
- **Tripenni Irianto Putro**, Ketua PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan pada 2015.
- **Janner Purba**, Ketua PN Kepahiang. Terlibat suap terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.
- **Toton**, hakim PN Kota Bengkulu. Terlibat suap terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.
- **Sudiwardono**, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Terlibat suap terkait perkara banding dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan selaku Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015.
- **Merry Purba**, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Medan. Diduga menerima total 280.000 dolar Singapura terkait putusan untuk terdakwa Tamin Sukardi.
- **Wahyu Widya Nurfitri**, hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Terlibat suap terkait gugatan perdata wanprestasi.
- **Iswahyu Widodo**, hakim PN Jakarta Selatan. Diduga menerima suap terkait penanganan perkara perdata.
- **Irwan**, hakim PN Jakarta Selatan. Diduga menerima suap terkait penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan.
- **Lasito**, hakim PN Semarang. Terlibat kasus suap yang melibatkan Bupati Jepara.
- **Kayat**, hakim PN Balikpapan. Terlibat kasus suap untuk memengaruhi putusan.

Panitera

- **Nurhadi Abdurrachman**, mantan Sekretaris Mahkamah Agung. Menerima suap total **Rp49,5 miliar** terkait pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Vonis 6 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.
- **Rohadi**, panitera pengganti PN Jakarta Utara. Menerima suap dan gratifikasi **Rp4,6 miliar**. Divonis 3,5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.
- **M. Ramadhan**, panitera pengganti PN Jakarta Selatan. Menerima suap **Rp180 juta** dan **Sin\$47.000** setara **Rp491 juta**. Vonis 4,5 tahun, denda Rp200 juta

Dugaan Penyebab Banyaknya Hakim Korupsi

- Rendahnya integritas
- Proses perekrutan hakim konstitusi sering bermasalah.
- Belum efektifnya pengawasan terhadap hakim konstitusi.



Hakim dan Panitera Terjerat Kasus Korupsi

Sumber: "Hakim dan Panitera Yang Terjerat Kasus Korupsi", Media Indonesia, dimuat dalam: <https://mediaindonesia.com/infografis/524763/hakim-dan-panitera-yang-terjerat-korupsi>

Daftar Nama Hakim/Panitera Terjerat Kasus Korupsi 2012-2017

Tabel. Daftar Nama Hakim/Panitera Terjerat Kasus Korupsi

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Tahun Kejadian/ Putusan	Lembaga yang Menindak
1.	Pragsono	hakim Pengadilan Tipikor Semarang	Uang suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni.	2012	KPK
2.	Asmadinata	hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah	Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.	2012	KPK
3.	Setyabudi Tejocahyono	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung	menerima suap Rp 150 juta. Diduga uang yang diterima Hakim Setya dari Asep ini berkaitan dengan dugaan suap bantuan sosial (Bansos) di Bandung.	2013	KPK
4.	Kartini Juliana Magdalena Marpaung	Hakim ad hoc Tipikor Semarang	Kartini ditangkap KPK tanggal 17 Agustus 2012 lalu bersama hakim ad hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono di halaman gedung PN Semarang karena menerima pemberian atau janji berupa uang tunai Rp 150 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.	2012	KPK
5.	Heru Kisbandono	hakim ad hoc Tipikor Pontianak	Untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan	2012	KPK

Sumber: Indonesian Corruption Watch www.antikorupsi.org

Daftar Nama Hakim/Panitera Terjerat Kasus Korupsi 2012-2017

			ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.		
6.	Bambang Agus Purnomo	Mantan staf administrasi pidana bagian pranata pidana Mahkamah Agung	Menerima uang dari Heru Kisbandono hakim ad hoc Tipikor Pontianak	2012	KPK
7.	Tripeni Irianto Putro	Ketua PTUN Medan	Diduga menerima Suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos medan tahun 2015	2015	KPK
8.	Amir Fauzi	Hakim PTUN Medan		2015	KPK
9.	Dermawan Ginting	Hakim PTUN Medan		2015	KPK
10.	Andri Trisianto Saputra	Kasubdit Kasasi dan Perdata Mahkamah Agung	Dugaan suap Penundaan salinan putusan Kasasi Terdakwa Ichsan	2016	KPK
11.	Edy Nasution	Panitera PN Jakarta Pusat	Suap dalam Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali MA	2016	KPK
12.	Muhammad Santoso	Panitera PN Jakarta Pusat	Suap dalam Perkara perdata PT. Mitra Maju Sukses melawan PT. Kapuas Tunggal Persada	2016	KPK
13.	Janner Purba	Ketua PN Kepahiang	Suap dalam perkara penyalahgunaan honor pengawas dan pembina RSUD M Yunus Bengkulu	2016	KPK
14.	Toton	Hakim PN Bengkulu		2016	KPK
15.	Badarudin Bachsin	Panitera PN Bengkulu		2016	KPK
16.	Rohadi	Panitera PN Jakarta Utara	Suap dalam Perkara Saiful Jamil	2016	KPK
17.	Ike Wijayanto	Plt. Panitera Muda Hubungan Industrial bandung	Dijerat karena suap setelah pengembangan kasus suap Hakim Imas	2013	KPK
18.	Ramlan Comel	Hakim Ad Hoc Tipikor Bandung	Keduanya menerima suap guna pengamanan perkara korupsi bansos pemkot Bandung. Hasil pengembangan perkara korupsi yang melibatkan Dada Rosada	2013	KPK
19.	Seferina Sinaga	Hakim Tinggi PT Jabar		2013	KPK
20.	Syamsir Yusfan	Panitera PTUN Medan	Bersama 3 hakim PTUN, diduga menerima Suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos medan	2014	KPK

Sumber: Indonesian Corruption Watch www.antikorupsi.org

Daftar Nama Hakim/Panitera Terjerat Kasus Korupsi 2012-2017

			tahun 2015.		
21.	Sarwo Edi	Pegawai PN Jakarta Pusat	Suap dalam Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali MA yang melibatkan Edy Nasution.	2016	KPK
22.	Irdiansyah	Pegawai PN Jakarta Pusat	Mereka menerima uang yang merupakan suap kepada Edy Nasution	2016	KPK
23.	Dewi Suryana	Hakim Tipikor Pengadilan Bengkulu	Suap dalam pengaturan putusan perkara korupsi. Dewi Suryana menerima 125 Juta sebagai commitment fee	2017	KPK
24.	Tarmizi	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Diduga menerima suap sebesar Rp425 juta dari Akhmad selaku kuasa hukum PT Aquamarine Davidson Inspection dan dari Yunus Nafik, Direktur Utama PR Aquamarine Davidson Inspection	2017	KPK
25.	Sudiwardono	Ketua Pengadilan Tinggi Manado	Diduga menerima suap terkait penahanan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi yang melibatkan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolaang Mongondow	2017	KPK

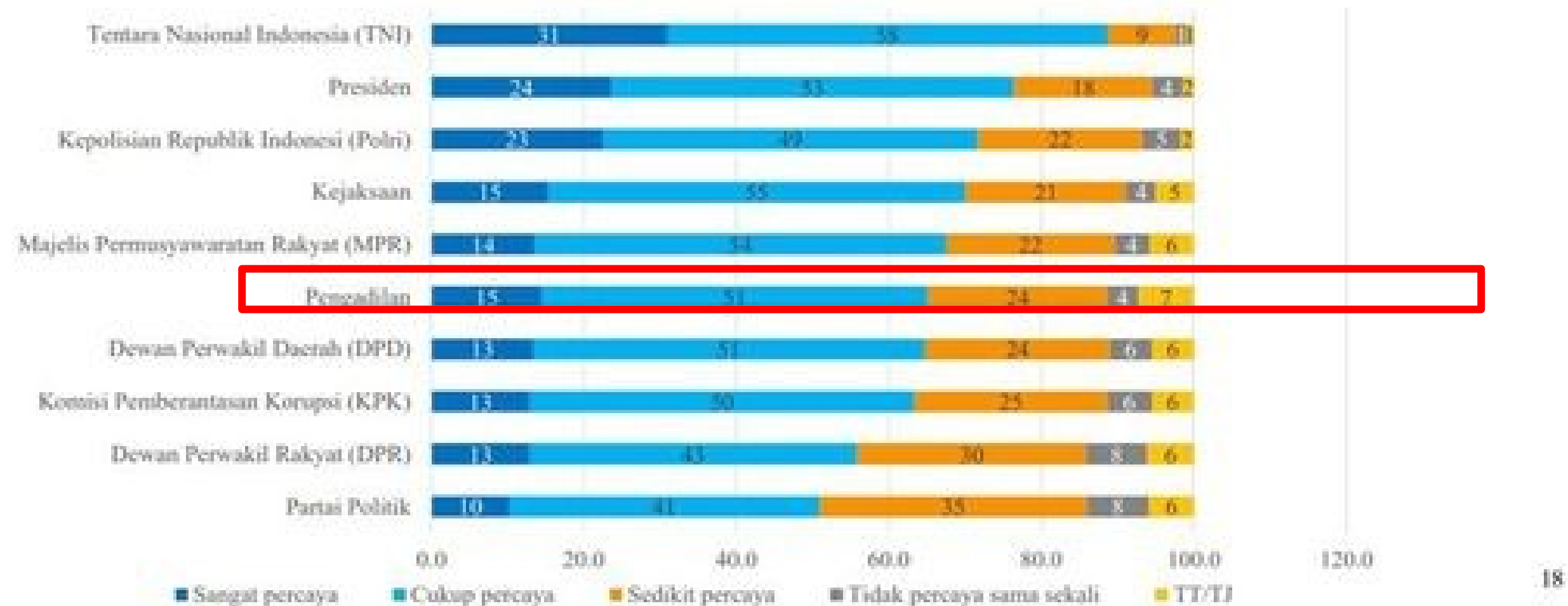
Dokumentasi: Koalisi Pemantau Peradilan dan ICW, data diolah dari berbagai sumber

Survei Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Peradilan



KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA

Apakah Ibu/Bapak sangat percaya (SA-P), cukup percaya (C-P), sedikit percaya (SI-P), atau tidak percaya sama sekali (TPSS) terhadap lembaga-lembaga berikut?... (%)



Survei Nasional, 27 Juni-5 Juli 2022

PENGADILAN

Menempati Peringkat 6 (Kategori Lembaga Negara)

- 15% Sangat Percaya
- 51% Cukup Percaya
- 24% Sedikit Percaya
- 4% Tidak Percaya
- 7% Tidak Percaya Sama sekali

Sumber: Lembaga Survei Indonesia, 2022 dimuat dalam: <https://www.lsi.or.id/>

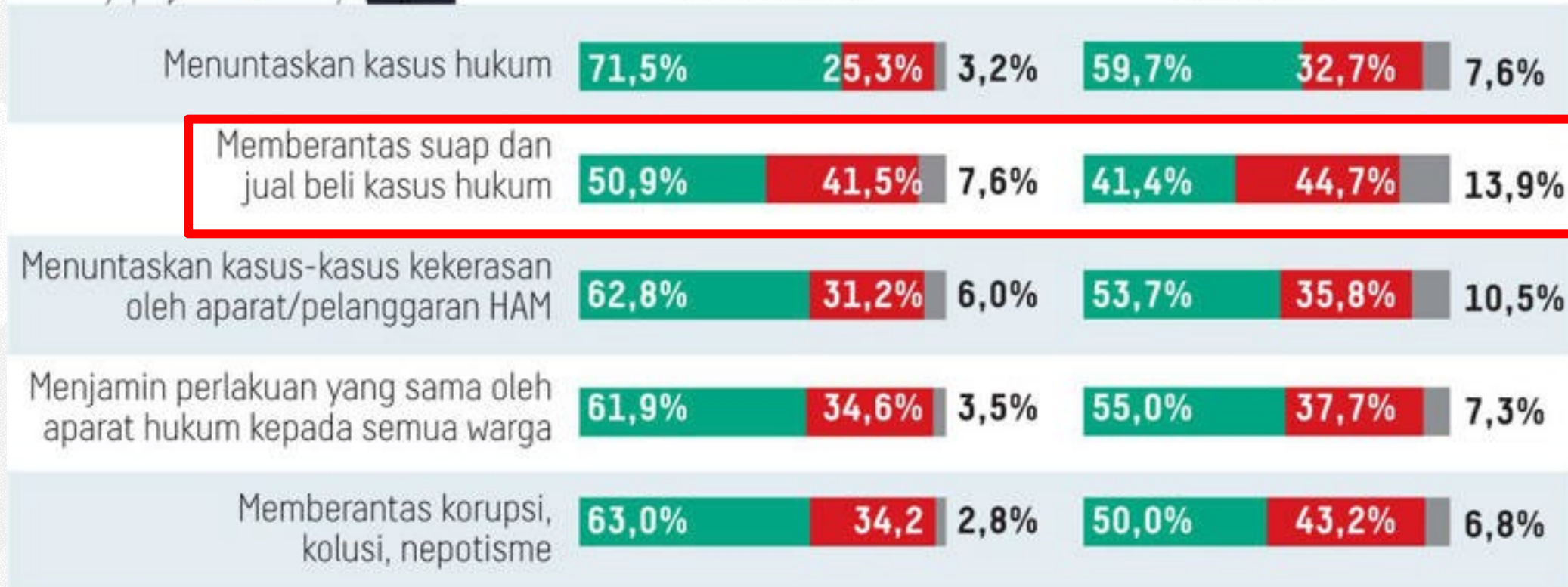
Puas atau Tidak Puaskah Anda dengan Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Bidang Penegakan Hukum?



■ Puas ■ Tidak Puas ■ Tidak Tahu

Januari 2022

Juni 2022



Metode Penelitian

Survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 26 Mei-4 Juni 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Sumber: Litbang Kompas/RFC/RGA



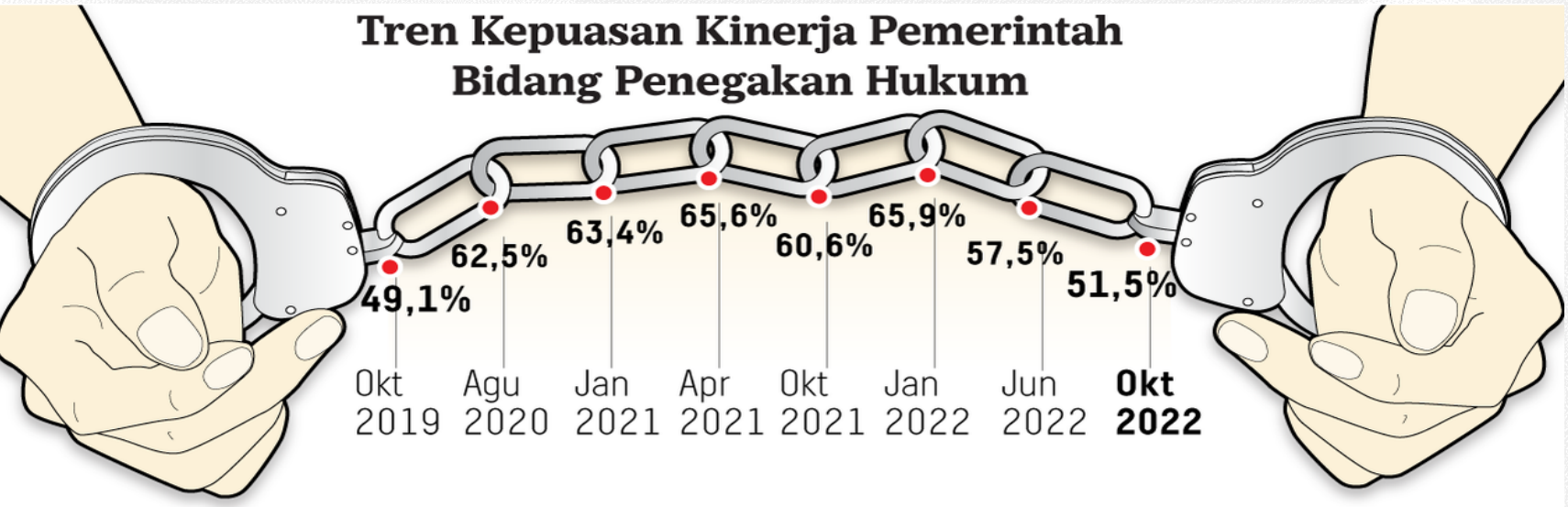
INFOGRAFIK: ISMAWADI



“Terlihat, bahwa dari Januari hingga Juni 2022, tingkat **kepuasan masyarakat dalam bidang penegakan hukum semakin menurun**. Hal ini yang sejatinya menjadi **Pekerjaan Rumah (PR) bersama**”

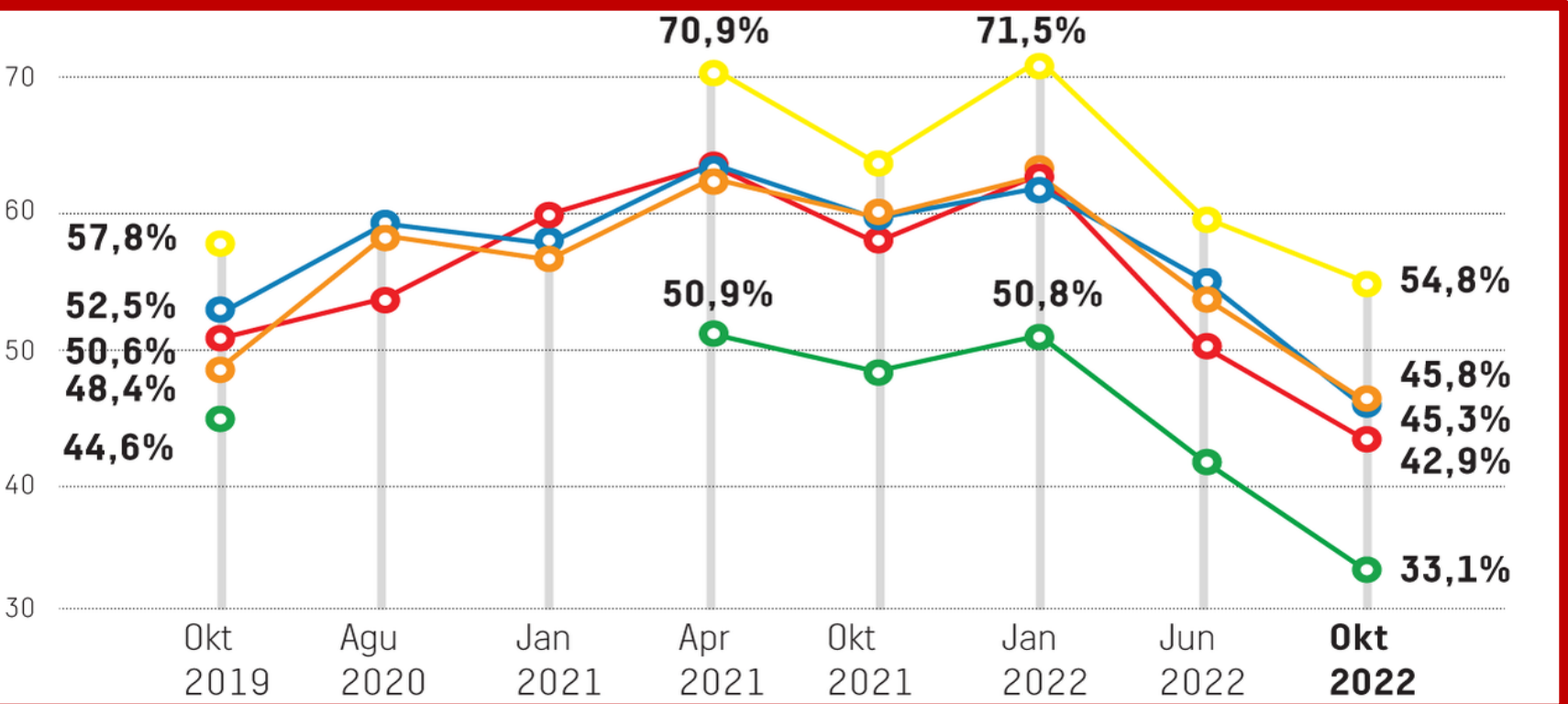
Sumber: Litbang Kompas Per-Juni 2022 <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kepercayaan-publik-terhadap-penuntasan-kasus-kekerasan-era-jokowi-maruf-kritis/ar-AAYDJ0H>

Tren Kepuasan Kinerja Pemerintah Bidang Penegakan Hukum



Tren Kepuasan Kinerja Pemerintah Bidang Penegakan Hukum Per Aspek

- Menuntaskan kasus hukum
- Menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga
- Memberantas KKN
- Menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/HAM
- Memberantas suap dan jual beli kasus hukum



Miris dan memilukan, dari tahun 2019 hingga Oktober 2022, tren kepuasan kinerja Pemerintah di bidang penegakan hukum semakin menurun.

Kondisi ini dapat dipahami, mengingat dari tahun ke tahun, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penegak hukum tiada henti-hentinya.

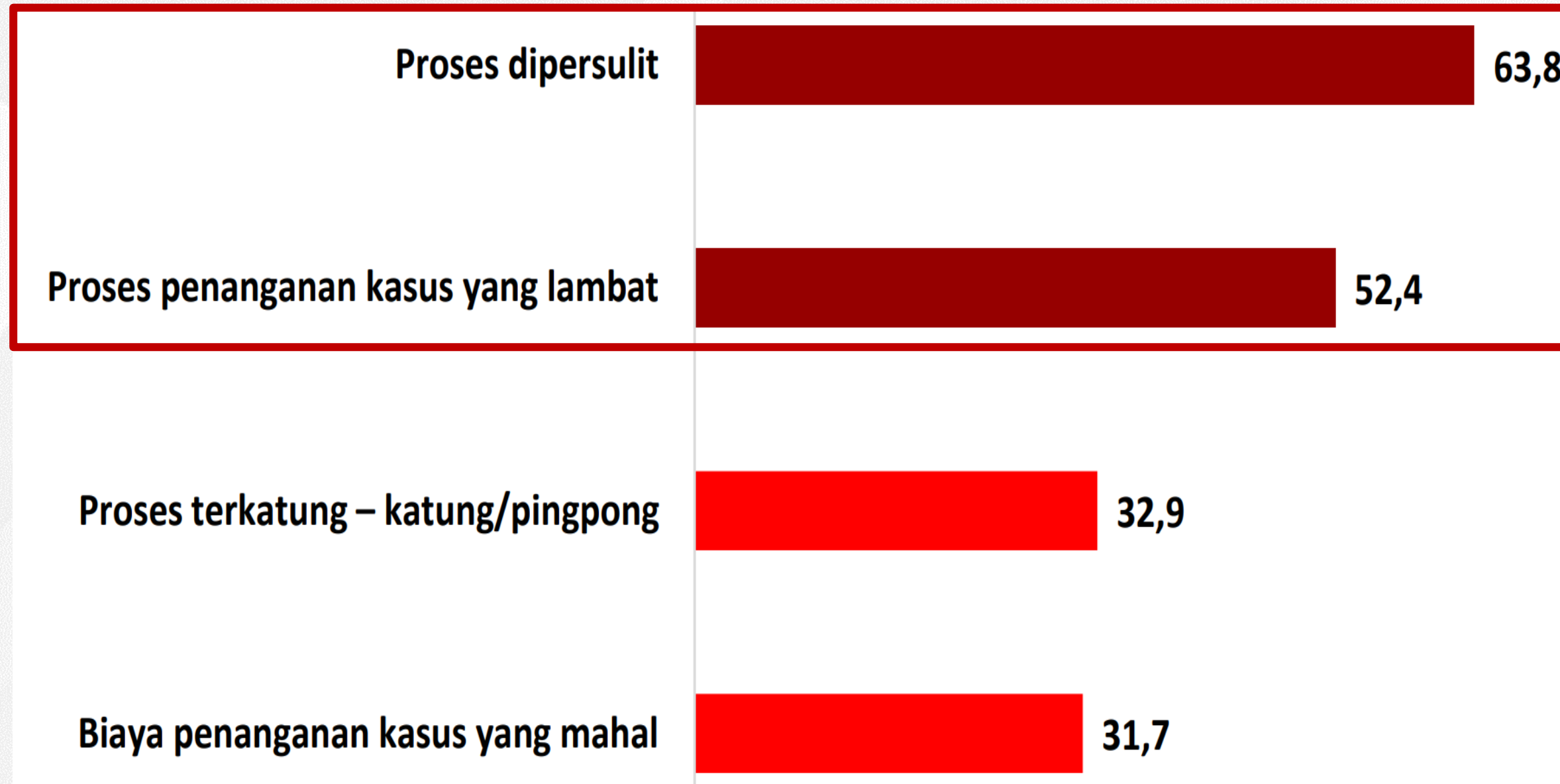
Metode Penelitian
 Survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 24 September-7 Oktober 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Sumber: Litbang Kompas/RFC/RGA

INFOGRAFIK: DICKY

Sumber: Kompas.id <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/23/alarm-dari-bidang-penegakan-hukum>

Proses dipersulit dan Penanganan yang lambat (*access to justice*) oleh lembaga penegak hukum, tak terkecuali dalam lingkup lembaga Peradilan



**Survey Nasional
 “Pandangan Masyarakat
 atas Hak Memperoleh
 Keadilan”
 Oleh Komisi Nasional Hak
 Asasi Manusia RI
 bekerjasama dengan
 Penelitian dan
 Pengembangan Kompas**

Sumber: Komnas HAM [https://www.komnasham.go.id/files/20211209-survei-nasional-pandangan-masyarakat-\\$TO4F.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211209-survei-nasional-pandangan-masyarakat-$TO4F.pdf)

Access To Justice Index in Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas dan Indonesia Judicial research Society (IJSR), pada tahun 2019, mencatat indeks akses terhadap keadilan di Indonesia berdasarkan “Kualitas Penyelesaian Perkara” berada pada nilai 76,7%.

	SCORE IN PUBLIC SURVEY	SCORE IN INTERVIEW EXPERTS	SCORE IN DATA ADMINISTRATIVE	INDEKS SCORE OF EACH ASPECT
LEGAL FRAMEWORK		57.7		57.7
LEGAL PROBLEMS RESOLUTION MECHANISM	50.0	14.8	1.2	66.0
LEGAL ASSISTANCE	51.7	7.9	1.5	61.2
QUALITY OF LEGAL PROBLEMS RESOLUTION PROCESS	76.7			76.7
RESULT OF THE LEGAL PROBLEMS RESOLUTION	65.6	6.1		71.7
PEOPLE'S CAPABILITY	78.3			78.3

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia Judicial Research Society (IJSR), et.al , *Access To Justice Index In Indonesia 2019*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJSR), 2019, hlm. 71, dimuat dalam: <http://ijrs.or.id/en/indonesian-access-to-justice-index/>

Kepuasan Terhadap Lembaga Hukum (Mahkamah AGUNG) (MENURUN)

Mahkamah Agung pun mengalami penurunan. Dari 74 pada Januari, menjadi 62,2 pada Juni. Lalu Mahkamah Konstitusi turun menjadi 58,9 per Juni usai menginjak angka 74,1 pada Januari.

Survei Litbang Kompas melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Metode ini berada pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error \pm 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.

Litbang Kompas pada Tahun 2022 menemukan bahwa adanya penurunan nilai kepuasan terhadap Mahkamah Agung turun sebesar **11,8 %** dari periode Januari sampai Juni 2022.

Sumber:

(1) Litbang Kompas, 2022, dimuat dalam: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/19/kepuasan-publik-ke-pemerintah-turun>

(2) CNN Indonesia, dimuat dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220621125144-12-811598/kpk-respons-survei-kompas-kepuasan-ke-semua-lembaga-hukum-menurun>

Indeks Semu Kepuasan Terhadap Mahkamah

Agung

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2021**

NILAI IKM	NILAI IKM
3,93/98,50	RESPONDEN
	JUMLAH : 329 ORANG JENIS KELAMIN :L =227 Orang/ P =102 PENDIDIKAN : SD = 0 SMP =1 SMA = 2 S1 =124 S2 =183 S3 = 19 Periode = Oktober 2021

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021, mencatat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Mahkamah Agung berada di nilai **3,93/98,50**.

Akan tetapi, nilai indeks tersebut menjadi **semu** karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dengan adanya praktik jual beli perkara di Mahkamah Agung.

Belajar dari Kusumah Atmadja



Ketua Pertama Mahkamah Agung Indonesia

Kisah Kusumah Atmadja Tolak Intervensi Bung Karno: Dalam literatur *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*, 2005, yang ditulis oleh Sebastiaan Pompe disebutkan Soekarno sempat berusaha mendekati Kusuma Atmadja mengenai kasus orang-orang yang terlibat kudeta pada 3 Juli 1946. Soekarno dikisahkan memang tidak frontal melakukan intervensi kepada Kusumah Atmadja atas kasus tersebut. **Usaha mempengaruhi dilakukannya dengan cara halus yakni meminta Kusumah Atmadja bertindak lebih lembut kepada para Terdakwa.** Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah. Bahkan **Kusumah mengancam mundur dari jabatannya jika Presiden Soekarno mencampuri kasus ini.**

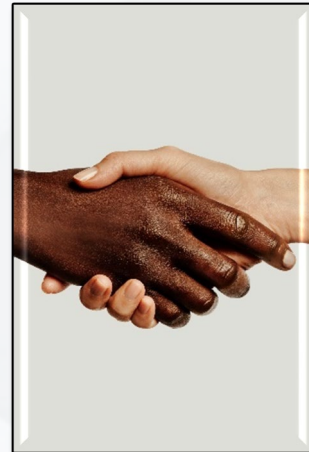
Pelajaran yang bisa diambil dari Sosok Kusumah Atmadja



Seorang Pemberani yang Lugas dan Tegas



Duri Bagi Soekarno, karena berani menolak Intervensi Bung Karno



- 1. Pantas Menjadi teladan**
- 2. Sulit mencari Sosok Kusumah Atmadja di MA**

Sosok Artidjo Alkostar: Wakil Tuhan yang ditakuti oleh para **Koruptor**



“Sogok Aku,
Kau Kutangkap”

Pensiun: 28 Mei 2018

Tangani 19,708 berkas dan menyelesaikan 1.095 perkara setiap tahun.
Tidak pernah mengambil cuti

DERETAN KASUS KORUPSI DIKETOK PALU ARTIDJO

 Luthfi Hasan Ishaq (Mantan Presiden PKS)	 Angelina Sondakh (Mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat)
 Akil Mochtar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi)	 Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten)
 Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat)	 Tubagus Chaeri Wardana (Adik mantan Gubernur Banten)
 Annas Maamun (Mantan Gubernur Riau)	 Tommy Hindratno (Eks pegawai pajak)
 Irjen (Pol) Djoko Susilo (Mantan Kakorlantas Polri)	 OC Kaligis (Pengacara)

Sumber: dari berbagai sumber

WHAT'S NEXT?

Perlunya Reformasi Terhadap Hakim



Reformasi Hukum untuk Pengadilan



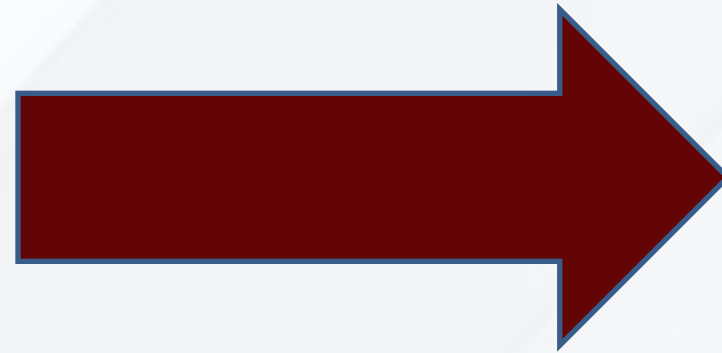
Marwah Keagungan Mahkamah Agung terletak pada diri Seorang Hakim

Putusan yang berkeadilan



Frasa **“Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”** yang berada dalam setiap Putusan Pengadilan → Memberikan pesan bahwa hakim merupakan **Jantungnya Pengadilan dan Wakil Tuhan di Muka Bumi** → Hakim harus **Bermoral dan Berintegritas!**





Hakim tidak hanya saja menjadi corong dari undang-undang, akan tetapi corong dari keadilan.



Oleh karena itu, *integritas hakim* akan mempengaruhi bagaimana keadilan itu dijalankan.

3 (Tiga) Bentuk Reformasi Hakim

1. Reformasi Institusional



Perlunya koordinasi antara **KY** dan **MA** baik secara internal maupun eksternal dalam mengawasi kode etik hakim secara terpadu.

2. Reformasi Kultural



Mengembalikan marwah **MA** sebagai tempat mencari keadilan yang sesungguhnya.

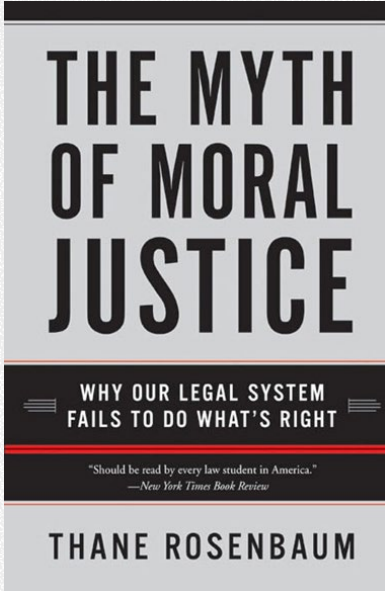
8 NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. KEMANDIRIAN
2. INTEGRITAS
3. KEJUJURAN
4. AKUNTABILITAS
5. RESPONSIBILITAS
6. KETERBUKAAN
7. KETIDAKBERPIHAKAN
8. PERLAKUAN YANG SAMA HADAPAN HUKUM

3. Reformasi Moral (Hakim)



Setidaknya perlu memperketat persyaratan dan mekanisme pencalonan dan seleksi menjadi Hakim Agung, karena hakim bukan wakil dari **PENGUASA**



INTEGRITY Programs



- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

LEGAL ADVOCACY TRAINING "MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yamus Hasan, S.H., LL.M.
Kepala PPAK Tahun 2002-2011
Kerus STHI - Jember

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Diansyah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lahi & Pelayanan Hukum pada Direktorat
Pembinaan Hukum JAMDATIN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- e-Copy Materi Legal Training
- Dogfight Buku dari Pemasih

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindak Pidana Korupsi terkait Korporasi,
2. Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Korporasi.

SESI II

1. Strategi Pengawasan Korporasi dan Perilaku yang baik Korporasi,
2. Memahami Perjanjian dan Perjanjian Tidak Pidana Korporasi,
3. Memahami Program Beneficial Ownership.

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi,
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule.

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi,
2. Menyoal Perayaan dan Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti-Pencucian Uang (SMAPU),
3. Menerapkan Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan ISO 37002 (Whistleblowing Management System).

SESI V

1. Pengendalian gangguan: Strategi dan faktor penyebab kepada public official,
2. Strategi mengatasi public official yang memiliki uang kotor,
3. Studi kasus.

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pengawasan Korporasi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus.

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi,
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (skorbal mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
0315000299
KCS-PO INDAH dan INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021 melalui link www.integritylawfirm.id

NARAHUBUNG Abdurrahman Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Drs. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
Faisal H. Basri, S.E., M.A.

MODERATOR
Karnis,
12 Agustus 2021
Live on Zoom,
13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE REGISTRASI!

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPAT?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang
Kebudayaan

Yudi Latief
Ketua PSIR Indonesia

Arul Sami
Wakil Ketua KPK RI

MODERATOR

Shahri Susanti
Mahasiswa STHI - Jember

Denny Indrayana
Senior Partner
INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Kamis, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

NARAHUBUNG
Febri Diansyah 08130947127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Moh. Saefuri
Pengasah Komunitas dan Pro-Debatif (Berkas) dari Sumatera

Rafly Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Muhlisana Fathimah
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Titi Anwarani
Deputy Partner Perkubum

Tan Limberg
Professor Mathematics Law School,
Australia

Jumat, 07 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD3

NARAHUBUNG
Febri Diansyah 08130947127

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

